Research Review
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol. 5, No. 2, November 2026 ISSN: 29622743

Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bulango Selatan

(Community Participation in Village Fund Management Planning in South Bulango District)

Fadel Saleh[1], Udin Hamim[2], Rustam Tohopi [3]
[1,2,3] Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
fadelsaleh017@gmail.com[1], udin.hamim@ung.ac.id[2], rustam@ung.ac.id[3]

Article Info

Article history:

Received: 6 Oktober 2026
Revised: 2 November 2026
Accepted: 2 November 2026

Keywords:

Community Participation
Village Funds
Village Development

Kata Kunci:

Partisipasi Masyarakat
Dana Desa
Pembangunan Desa.

Abstract

This study aims to analyze community participation in the management of Village Funds in Huntu Selatan Village, Bulango Selatan District, Bone Bolango Regency. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Research informants consisted of the village government and community members involved in the Village Fund management process. The results of the study indicate that community participation in the planning, implementation, and utilization of development outcomes is quite good. Community involvement occurs through village deliberations, mutual cooperation, activity monitoring, and utilization and maintenance of development outcomes. However, participation is not optimal due to low community attendance in deliberations, a lack of understanding of Village Funds, and limited information dissemination. The study concludes that community participation is a crucial factor in realizing transparent, accountable, and community-based Village Fund management. The village government needs to increase community outreach and involvement at every stage of Village Fund management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pemerintah desa dan masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan tergolong cukup baik. Masyarakat terlibat melalui musyawarah desa, gotong royong, pengawasan kegiatan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Namun demikian, partisipasi belum optimal karena masih terdapat rendahnya kehadiran masyarakat dalam musyawarah, kurangnya pemahaman mengenai Dana Desa, dan keterbatasan penyebaran informasi. Penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa perlu meningkatkan sosialisasi dan keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Corresponding Author:
Fadel Saleh
Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo
fadelsaleh017@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Desa memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pembangunan karena berada pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan secara langsung berhadapan dengan berbagai kebutuhan serta permasalahan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan desa melalui penyediaan Dana Desa. Kebijakan tersebut memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola sumber daya dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaannya (Pitono & Kartiwi, 2021).

Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaannya perlu dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, masyarakat tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan usulan, ikut menentukan prioritas pembangunan, serta mengawasi pelaksanaan program yang dibiayai melalui Dana Desa. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Majid, 2022).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya mencakup keterlibatan warga dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi, gagasan, kritik, saran, serta usulan mengenai program pembangunan yang dianggap menjadi prioritas. Keterlibatan tersebut menjadi penting karena keputusan yang dihasilkan melalui proses perencanaan diharapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa, perencanaan yang partisipatif juga dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan sekaligus meningkatkan pengawasan sosial terhadap penggunaan anggaran. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari kehadiran dalam forum musyawarah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu memberikan kontribusi pemikiran dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Wulandari et al., 2022).

Kondisi tersebut menjadi relevan dalam konteks Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Desa Huntu Selatan melaksanakan perencanaan pengelolaan Dana Desa melalui berbagai mekanisme, antara lain musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Informasi mengenai kegiatan dan anggaran desa juga disampaikan melalui pertemuan, musyawarah, baliho APBDes, serta media desa. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk membuka ruang bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi terkait program pembangunan (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

Meskipun demikian, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai persoalan. Berdasarkan data absensi rapat RKD Desa Huntu Selatan tahun 2022-2024, tingkat kehadiran masyarakat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 tingkat kehadiran mencapai 75 persen, kemudian menurun menjadi 60 persen pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 80 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya stabil dan konsisten dari tahun ke tahun. Penurunan tingkat kehadiran pada tahun 2023 dapat menunjukkan adanya persoalan dalam keterlibatan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kesadaran, motivasi, dan tanggung jawab masyarakat maupun dengan faktor eksternal seperti komunikasi, sosialisasi, dan kepemimpinan pemerintah desa (Ramadhan & Ma'ruf, 2022).

Permasalahan partisipasi tersebut memiliki konsekuensi terhadap proses pembangunan desa. Dalam skripsi ditemukan bahwa terdapat pekerjaan fisik berupa pembangunan saluran air yang sebelumnya telah masuk dalam rencana kerja pemerintah desa, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya kekhawatiran pekerjaan tidak selesai dalam tahun anggaran. Program tersebut kemudian direncanakan kembali, tetapi pada tahun berikutnya muncul regulasi yang tidak memperbolehkan pelaksanaan pekerjaan fisik sehingga pembangunan kembali tidak dapat direalisasikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan program, termasuk

tingkat keterlibatan masyarakat dan dinamika kebijakan yang berlaku. Dampaknya antara lain keterlambatan pembangunan, pengalihan anggaran ke kegiatan lain, serta belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang sebelumnya diprioritaskan (Larisu & Jopang, 2022).

Selain persoalan kehadiran masyarakat, kualitas partisipasi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah belum secara otomatis menunjukkan bahwa proses perencanaan telah berlangsung secara partisipatif. Partisipasi yang bermakna ditunjukkan melalui kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, memberikan gagasan, memengaruhi penetapan prioritas, serta ikut mengawasi keputusan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, peningkatan jumlah peserta musyawarah perlu diikuti dengan peningkatan kualitas interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa informasi mengenai program dan anggaran dapat dipahami masyarakat serta memberikan kesempatan yang proporsional bagi warga untuk menyampaikan aspirasi (Firmansyah et al., 2023).

Pengelolaan Dana Desa di Desa Huntu Selatan juga perlu dilihat dalam konteks tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Data anggaran dan belanja desa menunjukkan adanya dinamika antara target dan realisasi anggaran pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Pada tahun 2022, anggaran yang ditargetkan sebesar Rp1.077.615.226,00 dengan realisasi Rp1.109.057.549,00. Pada tahun 2023, target anggaran sebesar Rp1.225.720.141,00 dengan realisasi Rp1.247.652.650,00, sedangkan pada tahun 2024 target sebesar Rp1.320.001.353,00 dengan realisasi Rp1.451.823.589,00. Perubahan tersebut berkaitan dengan adanya penambahan dana melalui APBDes Perubahan dan penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas pembangunan desa. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat agar perubahan dan penetapan prioritas anggaran tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Tingkat pendidikan dan pengetahuan, kesadaran masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kepemimpinan pemerintah desa, keterbukaan informasi, komunikasi publik, serta keberadaan forum partisipatif dapat menentukan kualitas keterlibatan masyarakat. Masyarakat yang memperoleh informasi secara memadai mengenai Dana Desa akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memahami proses perencanaan dan memberikan masukan yang konstruktif. Sebaliknya, keterbatasan informasi dapat menciptakan kesenjangan pengetahuan yang pada akhirnya berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan (Lingtias & Yamin, 2024).

Dalam konteks administrasi publik, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang partisipasi yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pemerintahan. Perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat mencerminkan pendekatan *bottom-up planning*, karena kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan Dana Desa yang partisipatif dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan yang dihasilkan (Sujastiawan et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki hubungan dengan efektivitas pembangunan desa. Namun, kajian yang ada masih banyak berfokus pada pelaksanaan dan pengawasan, sementara tahap perencanaan sebagai fondasi awal pembangunan belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dari perspektif sosial, budaya, dan kelembagaan. Kondisi tersebut juga ditemukan dalam konteks Kecamatan Bulango Selatan, di mana kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa masih relatif terbatas. Sebagian kajian lebih banyak menyoroti aspek administratif pengelolaan Dana Desa tanpa mengkaji secara mendalam dinamika hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam proses perencanaan.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bulango Selatan. Penelitian ini diarahkan untuk memahami secara lebih komprehensif bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil pembangunan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat berlangsung dalam pengelolaan Dana Desa serta sejauh mana partisipasi masyarakat dapat mendukung terciptanya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, partisipasi masyarakat merupakan komponen strategis dalam pengelolaan Dana Desa karena dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan pembangunan. Namun, adanya fluktuasi kehadiran masyarakat, keterbatasan informasi, serta dinamika dalam proses perencanaan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan

Dana Desa di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan studi administrasi publik, khususnya mengenai tata kelola pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat, serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah desa dalam membangun mekanisme partisipasi yang lebih efektif, transparan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif**.** Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian diarahkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial berdasarkan kondisi yang berlangsung secara alamiah di lapangan, khususnya berkaitan dengan bentuk keterlibatan masyarakat, proses interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Sementara itu, sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta, gejala, dan kondisi penelitian secara sistematis, cermat, dan mendalam sesuai dengan informasi yang diperoleh selama proses penelitian (Andrianita et al., 2024).

Lokasi penelitian berada di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian serta adanya persoalan yang berkaitan dengan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Desa Huntu Selatan menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji proses partisipasi masyarakat karena perencanaan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Penelitian dilaksanakan melalui tahapan penjajakan lokasi, observasi, pengumpulan data, analisis data, penyusunan hasil penelitian, serta perumusan rekomendasi. Kehadiran peneliti dilakukan secara langsung di lokasi penelitian karena peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran tersebut diawali dengan penjajakan lokasi untuk memperoleh data awal dan dilanjutkan dengan observasi serta wawancara untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian (Nurrahmah et al., 2026).

Fokus penelitian diarahkan pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa, dengan perhatian terhadap tiga aspek utama, yaitu bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian melalui interaksi dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan terhadap fenomena yang diteliti. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Huntu Selatan. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia, seperti buku, laporan, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan pengelolaan Dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian dan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Melalui observasi, peneliti dapat melihat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa, mulai dari proses perencanaan, penyusunan prioritas kegiatan, hingga pengambilan keputusan. Observasi juga digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai dinamika partisipasi masyarakat serta interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, data hasil observasi dapat memberikan gambaran mengenai kondisi nyata yang berlangsung di lapangan dan tidak hanya bergantung pada informasi yang disampaikan oleh informan (Sari et al., 2025).

Teknik kedua adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai pengelolaan Dana Desa. Informan yang diwawancarai meliputi kepala desa, perangkat desa, BPD, serta masyarakat. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat, proses keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, wawancara menggunakan pedoman wawancara agar proses pengumpulan informasi tetap terarah dan sesuai dengan fokus penelitian. Wawancara mendalam juga memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, serta kondisi yang mereka ketahui terkait proses perencanaan pengelolaan Dana Desa (Sukarno & Hartanto, 2025).

Teknik ketiga adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan Dana Desa. Dokumen yang digunakan antara lain Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), laporan hasil musyawarah desa, serta laporan realisasi Dana Desa. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara sekaligus menjadi bahan pembanding terhadap data lapangan. Dokumen tersebut juga memberikan gambaran administratif mengenai proses perencanaan dan pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga membantu peneliti memverifikasi konsistensi informasi yang diperoleh dari sumber lainnya (Nur, 2025).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak peneliti berada di lapangan sampai seluruh data terkumpul. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap kedua adalah penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data dapat berupa uraian, gambaran, bagan, skema, maupun tabel sesuai dengan kebutuhan analisis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan diperoleh berdasarkan temuan lapangan yang telah melalui proses reduksi dan penyajian data. Kesimpulan pada tahap awal bersifat sementara sehingga perlu dilakukan verifikasi melalui pengecekan kembali terhadap data, konfirmasi kepada informan, serta pembandingan dengan teori yang relevan (Risky & Firdaus, 2024).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data. Penelitian menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat yang terlibat dalam musyawarah desa. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber data yang sama. Sebagai contoh, informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa yang diperoleh melalui wawancara diperiksa kembali melalui hasil observasi dan dokumen resmi seperti notulen rapat atau laporan kegiatan. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan memperoleh data pada waktu yang berbeda, termasuk melalui wawancara ulang atau observasi tambahan, untuk melihat konsistensi informasi yang diberikan oleh informan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango telah berjalan cukup baik. Partisipasi masyarakat terlihat melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, penyampaian pendapat dan usulan, serta keterlibatan dalam menentukan program pembangunan yang menjadi prioritas desa. Dalam konteks penelitian ini, partisipasi dalam perencanaan dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui pemberian ide, saran, pendapat, dan usulan terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Proses perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Huntu Selatan diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Dalam forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan yang dianggap penting untuk menjadi prioritas pembangunan. Selanjutnya, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat membahas berbagai usulan tersebut untuk menentukan program yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan telah diarahkan pada pola yang sistematis, terbuka, dan melibatkan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu unsur yang mendukung proses partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh informasi mengenai perencanaan dan penggunaan Dana Desa melalui musyawarah desa, rapat bersama masyarakat, undangan resmi, media informasi desa, serta pemasangan baliho APBDes di depan kantor desa. Keberadaan media informasi tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui program dan anggaran yang direncanakan pemerintah desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya dibangun melalui kehadiran dalam forum musyawarah, tetapi juga melalui keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat memahami agenda pembangunan desa.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat telah ditempatkan sebagai bagian dari proses perencanaan, bukan semata-mata sebagai penerima hasil pembangunan. Masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan usulan yang berkaitan dengan pembangunan jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat merupakan pihak yang paling mengetahui

kebutuhan dan permasalahan di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan menjadi penting agar penggunaan Dana Desa dapat diarahkan pada kebutuhan yang dianggap prioritas oleh masyarakat.

3.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Huntu Selatan tidak hanya terlibat dalam proses perencanaan, tetapi juga ikut mendukung pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa. Bentuk partisipasi tersebut terlihat melalui kegiatan gotong royong, keterlibatan dalam pekerjaan pembangunan fisik, dukungan terhadap kegiatan desa, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan fisik, termasuk pembangunan rabat beton, jalan, saluran air, dan kegiatan lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan juga ditunjukkan melalui pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Masyarakat memiliki ruang untuk melihat dan mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemerintah desa berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan, sedangkan masyarakat memberikan dukungan melalui keterlibatan langsung dan kontrol sosial. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga melibatkan beberapa unsur pelaksana, seperti Pelaksana Kegiatan (PK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), bendahara desa, dan unsur perencanaan. Masing-masing unsur tersebut bekerja sama dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan anggaran yang telah ditetapkan.

Namun, tingkat keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya sama. Sebagian masyarakat aktif mengikuti kegiatan gotong royong dan pekerjaan pembangunan, sedangkan sebagian lainnya kurang terlibat karena memiliki kesibukan lain. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sudah terbentuk, tetapi tingkat keterlibatannya masih beragam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih merata sehingga pelaksanaan pembangunan tidak hanya bergantung pada kelompok masyarakat tertentu.

3.3 Partisipasi Msyarakat dalam Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil menunjukkan keterlibatan masyarakat setelah program pembangunan selesai dilaksanakan. Dalam penelitian ini, partisipasi pada tahap pemanfaatan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan masyarakat merasakan manfaat pembangunan, tetapi juga keterlibatan dalam menjaga, memelihara, dan menggunakan hasil pembangunan agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Huntu Selatan telah merasakan manfaat dari berbagai program yang dibiayai melalui Dana Desa. Manfaat tersebut terutama terlihat pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, seperti jalan rabat beton, saluran air, MCK, serta fasilitas umum lainnya. Pembangunan jalan rabat beton, misalnya, memberikan manfaat terhadap aktivitas masyarakat karena kondisi jalan yang sebelumnya berlubang dan becek ketika hujan menjadi lebih baik dan lebih mudah dilalui. Demikian pula pembangunan saluran air memberikan manfaat bagi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Selain menerima manfaat, masyarakat juga menunjukkan keterlibatan dalam menjaga dan memelihara hasil pembangunan. Bentuk keterlibatan tersebut antara lain membersihkan saluran air, menjaga fasilitas umum, dan melaksanakan kerja bakti lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti setelah pembangunan selesai, tetapi berlanjut dalam bentuk pemeliharaan hasil pembangunan. Pemeliharaan tersebut penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga keberlanjutan manfaatnya.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Huntu Selatan telah berlangsung pada tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Pada tahap perencanaan, masyarakat terlibat melalui musyawarah, penyampaian aspirasi, dan pemberian usulan. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat melalui gotong royong, pekerjaan pembangunan, dukungan terhadap kegiatan desa, dan pengawasan. Sementara itu, pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat merasakan manfaat pembangunan sekaligus ikut menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi di Desa Huntu Selatan telah tersedia dan berjalan cukup baik. Akan tetapi, partisipasi tersebut masih menghadapi beberapa kendala, terutama rendahnya kehadiran sebagian masyarakat dalam musyawarah, keterbatasan pemahaman mengenai Dana Desa, serta penyebaran informasi yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi tidak cukup hanya dengan menyediakan forum musyawarah, tetapi juga

membutuhkan keterbukaan informasi, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pendekatan pemerintah desa yang lebih dekat kepada masyarakat.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menciptakan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Huntu Selatan perlu terus memperkuat mekanisme komunikasi dan keterbukaan informasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai program dan anggaran desa. Pada saat yang sama, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan keterlibatannya dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Huntu Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya optimal dan merata. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, tetapi juga dari keterlibatan dalam menyampaikan pendapat dan usulan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan kegiatan, serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki ruang untuk terlibat dalam berbagai tahapan pengelolaan Dana Desa, tetapi kualitas dan konsistensi keterlibatan tersebut masih perlu diperkuat.

Pada aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan, masyarakat Desa Huntu Selatan telah memperoleh informasi mengenai kegiatan perencanaan Dana Desa melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan pemerintah desa. Informasi disampaikan melalui musyawarah desa, rapat bersama masyarakat, undangan resmi, media informasi desa, serta pemasangan baliho APBDes di depan kantor desa. Mekanisme tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui rencana program dan penggunaan anggaran desa.

Pada aspek partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa. Bentuk keterlibatan tersebut terlihat melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, bantuan tenaga dalam pembangunan fisik, dukungan terhadap kegiatan desa, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Masyarakat turut dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur seperti rabat beton dan saluran air.

Pada aspek partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil, masyarakat Desa Huntu Selatan telah merasakan manfaat nyata dari berbagai program yang dibiayai melalui Dana Desa. Hasil pembangunan yang dirasakan antara lain jalan rabat beton, saluran air, MCK, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Pembangunan tersebut memberikan manfaat terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat, termasuk memperbaiki akses dan mendukung kegiatan masyarakat di lingkungan desa. Jalan yang sebelumnya berlubang dan becek menjadi lebih mudah dilalui setelah pembangunan rabat beton.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Huntu Selatan telah mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Pada tahap perencanaan, masyarakat telah diberikan ruang untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berkontribusi melalui tenaga, gotong royong, dukungan, dan pengawasan. Sementara itu, pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat tidak hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi juga ikut menjaga dan memelihara fasilitas yang telah dibangun. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah ditempatkan sebagai bagian dari proses pembangunan desa, bukan hanya sebagai penerima manfaat.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan pengelolaan Dana Desa di Desa Huntu Selatan.

Pertama, bagi Pemerintah Desa Huntu Selatan, perlu dilakukan peningkatan keterbukaan informasi dan sosialisasi mengenai seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan. Penyampaian informasi tidak cukup hanya melalui forum musyawarah dan baliho APBDes, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan media informasi desa dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Upaya tersebut penting agar masyarakat memahami program yang direncanakan, sumber pembiayaannya, tujuan kegiatan, serta bentuk keterlibatan yang dapat diberikan. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan pendekatan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum aktif mengikuti musyawarah maupun kegiatan pembangunan.

Kedua, dalam aspek perencanaan, pemerintah desa perlu memastikan bahwa forum musyawarah benar-benar menjadi ruang partisipasi yang terbuka dan substantif. Setiap usulan masyarakat perlu didokumentasikan, dibahas berdasarkan kebutuhan dan prioritas desa, serta diberikan penjelasan apabila belum dapat direalisasikan. Hal tersebut penting karena tidak semua usulan masyarakat dapat langsung dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran dan adanya prioritas pembangunan. Dengan memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan penentuan prioritas, masyarakat akan lebih memahami proses pengambilan keputusan dan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah desa.

Ketiga, bagi masyarakat Desa Huntu Selatan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa. Partisipasi tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran dalam musyawarah, tetapi juga melalui penyampaian aspirasi yang konstruktif, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan, pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap fasilitas yang telah dibangun sehingga manfaat Dana Desa dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Keempat, bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa sekaligus menjalankan peran sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. BPD diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi formal dalam pemerintahan desa, tetapi juga secara aktif menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat berkaitan dengan kebutuhan pembangunan. Penguatan fungsi tersebut dapat membantu memastikan bahwa program yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah desa tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kelima, bagi pemerintah kecamatan dan kabupaten, diperlukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif kepada pemerintah desa, khususnya berkaitan dengan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pendampingan dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menyampaikan informasi publik, mengelola forum partisipatif, menampung aspirasi masyarakat, serta mengembangkan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat. Dukungan dari pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten penting agar pemerintah desa memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola Dana Desa secara efektif dan partisipatif.

REFERENSI

Firmansyah, Budiman, A., Adilansyah, Muhamadong, & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, *7*(1), 668–674. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502/http

Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, *12*(2), 100–108.

Larisu, Z., & Jopang. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. *Sebatik*, *26*(2), 622–629. https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2050

Lingtias, I., & Yamin, N. Y. (2024). Menakar Kepercayaan Publik: Analisis Perspektif Masyarakat Tentang Transparansi, Partisipasi, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *9*(1), 184–199. https://doi.org/10.29303/jaa.v9i1.476

Majid, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, *2*(1), 33–46.

Nur, M. (2025). Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, *5*(3).

Nurrahmah, A. S., Azzahra, A. L., & Wisnu, M. (2026). Rancangan Dan Langkah-Langkah Penelitian Kualitatif. *Qalam Lil Mubtadin*, *4*(1).

Pitono, A., & Kartiwi. (2021). Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, *6*(1), 33–56.

Ramadhan, W. D., & Ma'ruf, M. F. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa (Studi Pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo). *Journal Publika*, *10*(2).

Risky, P. A., & Firdaus, M. (2024). Pengelolaan Arsip Dinamis pada Kantor Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan. *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, *4*(2), 588–600.

Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi Aisyah. *Indonesian Research Journal on Education*, *5*(4), 539–545.

Sujastiawan, A., Wijaya, D., & Yamin, M. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Di Desa Muer. *Jurna; Kapita Selekta Administrasi Publik*, *6*(1), 475–478.

Sukarno, A., & Hartanto, H. Y. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa. *EXERO Journal of Research in Business and Economics*, *8*(2), 163–186.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wulandari, S. M., Yuliandari, E., & Rusnaini. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Pucanggading, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang). *Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, *1*(4), 745–757.